

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki 3 (tiga) pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dimana pembangunan ekonomi menjadi faktor utamanya. Salah satu langkah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah membangun koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak tatanan ekonomi nasional.

Sebagai gerakan ekonomi nasional, koperasi bertujuan untuk menjadi wadah perekonomian nasional agar masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi perekonomiannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan membangun tatanan ekonomi nasional, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 3, bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1, bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam pengelolaan koperasi perlu dikelola oleh manajemen yang baik. Secara umum, manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang dalam pengelolaan kegiatannya, baik dilakukan sendiri maupun secara berkelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Namun, pengelolaan koperasi berbeda dengan usaha lainnya, karena pengelolaan koperasi memiliki filosofi dasar yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sehingga mencerminkan perwujudan dari falsafah demokrasi yang menjadi ciri khas koperasi dalam usahanya.

Manajemen merupakan faktor penting dalam usaha. Agar tujuan manajemen dan pemilik sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan pengukuran aktivitas perusahaan terhadap manajemen.

Dengan mengukur kinerja keuangan, dimungkinkan untuk membandingkan kinerja keuangan dari periode lalu dan periode berikutnya. Untuk melihat apakah kinerja koperasi mengalami peningkatan atau penurunan. Suatu koperasi dapat dikatakan bernilai apabila kinerja keuangan tersebut baik. Kinerja suatu koperasi dapat dilihat dari beberapa sudut, salah satunya tercermin dalam hasil kinerja keuangannya.

Menurut Munawir (2012:30) mendefinisikan bahwa “Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu di antara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan”. Namun, ketika mengevaluasi kinerja keuangan, ukuran penilaian bervariasi di antara koperasi yang satu dengan yang lain. Analisis rasio digunakan untuk mengukur hasil koperasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam analisis rasio, kelemahan rasio adalah sulitnya memilih rasio yang tepat untuk digunakan bagi kepentingan pemegang saham. penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio hanya berorientasi pada hasil, namun koperasi saat ini tidak dituntut untuk mengutamakan keuntungan, melainkan berorientasi pada nilai. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka digunakan metode *Economic Value Added* (EVA).

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode nilai tambah ekonomi. EVA adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (dalam Iramani & Febrian :2005).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis-jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan dalam dua kriteria yaitu berdasarkan jenis usaha dan berdasarkan keanggotaannya. Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas Koperasi Simpan

Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. Sedangkan jenis usaha koperasi berdasarkan keanggotaannya terdiri dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah, Koperasi Karyawan (KOPKAR), dan Koperasi Unit Desa (KUD).

KPRI merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang didirikan serta dikelola untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil. Jadi anggota KPRI merupakan sekelompok orang di wilayah kerja misalnya : kecamatan, sekolah, serta lembaga pemerintah lainnya. Pendiri dan anggota KPRI adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, KPRI sebagai badan usaha yang beranggotakan para anggota PNS, maka keberhasilan usahanya sangat tergantung pada kemampuan anggota untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS), sebuah koperasi yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No.75, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kotakulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45362, yang berbadan hukum nomor 7085/BH/PDD/PAD/KWK.10/III/98 tanggal 18 Maret 1998. Adapun unit usaha yang ada di KPRI-KPKS adalah sebagai berikut :

- 1) Minimarket “Husada”
- 2) Fotocopy
- 3) Gedung Serba Guna
- 4) Sewa Barang
- 5) Simpan Pinjam

Penelitian ini dilakukan pada Unit Minimarket “Husada” yang merupakan salah satu unit yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, sembako, dan sebagainya. Namun pada tahun 2022 terjadinya penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2021, yang mana pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 80.794.038 sementara pada tahun 2022 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 64.278.400. Penurunan ini terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kurangnya kontribusi anggota dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi. Sementara itu, barang-barang yang diperjualbelikan di unit minimarket “Husada” sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota dan memiliki harga barang yang sangat kompetitif dengan harga di minimarket lainnya. Oleh karena itu, akibat dari penurunan pendapatan yang terjadi pada tahun 2022 maka peneliti tertarik mengambil penelitian pada unit minimarket “Husada”.

Sistem pembayaran pada Unit Minimarket Husada KPRI-KPKS bagi anggota koperasi bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit, dengan ketentuan barang konsumsi jangka waktunya selama satu bulan. Pada proses pembelian di Unit Minimarket Husada KPRI-KPKS anggota koperasi melakukan transaksi menunjukkan kartu anggota koperasi sehingga data transaksi yang dilakukan akan tercatat dan menjadi keuntungan untuk penambahan bagi SHU.

Adapun perkembangan anggota pada KPRI-KPKS periode 2013-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah anggota di KPRI-KPKS tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Perkembangan (%)
2013	1.901	-
2014	1.929	1,47
2015	1.942	0,67
2016	1.932	(0,5)
2017	1.954	1,14
2018	1.932	(1,1)
2019	1.945	0,67
2020	1.878	(3,4)
2021	1.695	(9,7)
2022	1.646	(2,9)

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS Tahun 2013-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa perkembangan anggota pada KPRI-KPKS tahun 2013-2022 mengalami fluktuatif. Namun, pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan jumlah anggota dari tahun 2020, mengalami penurunan jumlah anggota sebesar 183 orang. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggota yang keluar karena sudah pensiun, anggota yang pindah kerja, dikeluarkan, dan anggota yang sudah meninggal dunia.

Dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, manajemen koperasi harus mengelola modal sebaik mungkin, modal yang cukup diperlukan untuk berbagai kegiatan usaha yang dikelola koperasi, sehingga usaha koperasi dapat berfungsi dengan baik dan berkembang sesuai dengan harapan koperasi dan anggotanya. Modal yang dikeluarkan koperasi diharapkan dapat pengembalian yang maksimal juga bagi pemilik modalnya.

Modal memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan operasional suatu badan usaha, setiap badan usaha membutuhkan modal untuk operasional sehari-

hari. Tentunya diperlukan permodalan yang memadai dan baik untuk menunjang seluruh kegiatan perusahaan secara kualitas dan kuantitas. Modal juga sangat penting untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, setiap unit usaha berupaya untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Dengan terpenuhinya modal usaha, maka dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini, struktur modal mencerminkan keseimbangan seluruh utang (utang jangka pendek dan jangka panjang) dan komponen modal sendiri.

Menurut Houston (2001) mendefinisikan bahwa “struktur modal dapat diukur dengan rasio perbandingan antara total hutang terhadap modal sendiri disebut *debt to equity ratio* (DER), artinya jika hutang perusahaan lebih tinggi dari modal sendirinya, maka penggunaan hutang lebih besar dalam mendanai aktivitas perusahaan”.

Salah satu upaya koperasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan adalah dengan mengukur struktur modal, pertumbuhan koperasi, yang mempengaruhi tingkat kinerja koperasi dan nilai koperasi, sehingga mengukur kemampuan koperasi dapat meningkat. Struktur modal mengacu pada jumlah utang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva koperasi. Struktur modal yang optimal dapat mencerminkan perekonomian yang kuat dan stabil.

Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal. Modal sendiri dapat terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi. Sedangkan modal pinjaman berasal dari : anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya,

serta penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Adapun modal sendiri dan modal pinjaman yang dimiliki KPRI-KPKS tahun 2013-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan modal sendiri, dan modal pinjaman pada KPRI-KPKS periode 2013-2022

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Perkembangan Modal Sendiri (%)	Modal Pinjaman (Rp)	Perkembangan Modal Pinjaman (%)
2013	12.788.785.587	-	4.554.972	-
2014	14.280.209.702	11,66	8.823.445	93,7
2015	16.327.542.336	14,34	10.547.289	19,5
2016	18.724.906.528	14,68	14.980.690	42,0
2017	21.011.191.147	16,38	15.588.013	4,05
2018	22.167.999.073	5,50	21.467.929	37,7
2019	23.637.138.447	6,63	18.881.382	(12,0)
2020	24.973.261.372	5,65	7.838.847	(58,5)
2021	25.167.708.385	0,78	19.853.948	153,3
2022	25.536.346.804	1,46	9.037.153	(54,5)

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS tahun 2013-2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang dari tahun 2013-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun modal pinjaman yang dimiliki KPRI-KPKS dari tahun 2013-2022 mengalami fluktuatif. Serta jika dilihat secara keseluruhan bahwa modal sendiri yang dimiliki KPRI-KPKS lebih besar dibandingkan dengan modal pinjamannya. Menurut Bambang Riyanto (2010:293) “Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar.” Hal tersebut mencerminkan bahwa KPRI-KPKS telah dikatakan mandiri dari segi modalnya,

disebabkan KPRI-KPKS dalam memenuhi kebutuhan dananya lebih mengutamakan modal sendiri yang dimiliki dibandingkan modal dari pihak luar.

Dana yang dihimpun oleh koperasi baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman digunakan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan usaha koperasi. Dana atau modal yang digunakan koperasi tidak lain untuk memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal. Memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal, tentunya koperasi akan mensejahterakan para pemilik modalnya. Besarnya sisa hasil usaha haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan bukan hanya sekedar menghasilkan sisa hasil usaha, tetapi kesejahteraan anggota sebagai pemilik modal pun harus terpenuhi.

Berikut gambaran kemampuan koperasi dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan sisa hasil usaha.

Tabel 1.3 Perkembangan Modal Sendiri, SHU, dan *Return on Equity* pada KPRI-KPKS Tahun 2013-2022

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Perkembangan MS (%)	SHU setelah pajak (Rp)	Perkembangan SHU (%)	<i>Return on Equity</i> (%)
2013	12.788.785.587	-	216.856.045	-	1,70
2014	14.280.209.702	11,66	464.641.228	114	3,25
2015	16.327.542.336	14,37	614.363.191	32,2	3,76
2016	18.724.906.528	14,68	714.064.783	16,2	3,81
2017	21.011.191.147	16,38	900.245.205	26,0	4,28
2018	22.167.999.073	5,50	385.582.027	(57)	1,74
2019	23.637.138.447	6,63	584.361.509	51,5	2,47
2020	24.973.261.372	5,65	837.908.442	43,4	3,35
2021	25.167.708.385	0,78	637.910.810	(24)	2,53
2022	25.536.346.804	1,46	315.019.099	(51)	1,23

Sumber : laporan RAT KPRI-KPKS tahun 2013-2022

Berdasarkan Tabel 1.3 bahwa perkembangan modal sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2013-2022. Namun terjadinya kenaikan modal

sendiri yang dimiliki KPRI-KPKS tidak sebanding dengan sisa hasil usaha yang mengalami fluktuatif. Sisa hasil usaha yang diperoleh dipengaruhi oleh banyak faktor, tergantung pada koperasi dalam pengelolaan kinerja keuangan yang dijalankan, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana koperasi, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun *Return on Equity* (ROE) yaitu rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu koperasi dalam menghasilkan laba dari investasi anggota yang dinyatakan dalam persentase. *Return on Equity* menunjukkan seberapa berhasilnya koperasi dalam mengelola modal, sehingga keuntungannya dapat diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian terhadap investasi anggota. Sebagai pemilik modal, anggota berharap mendapatkan pengembalian yang sesuai dengan modal yang ditanamkan. Anggota koperasi cenderung tertarik menanamkan modalnya kepada koperasi apabila investasi yang dilakukan anggota kepada koperasi memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Menurut Kasmir (2016:205) adapun rata-rata industri *Return on Equity* yaitu 40%. Semakin besar *Return on Equity* mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal. Hal ini berdampak terhadap peningkatan nilai koperasi. Namun rata-rata *Return on Equity* pada KPRI-KPKS periode 2013-2022 yaitu 28,12% yang artinya di bawah standar 40%. Dengan kata lain kemampuan koperasi memperoleh laba yang tersedia bagi pemilik modal masih kurang baik.

Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan metode yang lebih tepat untuk mengukur kinerja keuangan koperasi yaitu menggunakan metode *Economic Value Added* (EVA). Metode EVA memungkinkan koperasi menghitung kinerja keuangan dan pendapatan koperasi yang sesuai, sehingga pihak manajemen dapat mengetahui keberhasilan yang telah dicapai koperasi. Karena *Economic Value Added* (EVA) didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis (disebut juga penghasilan sisa) yang menyatakan bahwa kekayaan hanya tercipta ketika koperasi meliputi biaya operasional dan biaya modal. Metode EVA juga dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan modal dan perencanaan keuangan koperasi selanjutnya, sehingga kegiatan usaha koperasi dapat lebih difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomis. Begitu pula dengan koperasi mengukur kinerja keuangan menggunakan *Economic Value Added* (EVA) ini diharapkan akan efektif dengan pengembalian yang didapat oleh koperasi. Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang seharusnya, dengan modal yang dimilikinya. Kondisi pengelolaan kinerja keuangan koperasi yang baik seharusnya SHU yang diperoleh koperasi pun tinggi sehingga dapat menambah nilai koperasi.

Selain dilihat dari kinerja keuangan koperasi dalam mendapatkan nilai tambah ekonomis, koperasi sebagai organisasi yang didirikan oleh kelompok orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama, maka dalam keberhasilan menjalankan usahanya ditujukan untuk mensejahterakan pendirinya yaitu anggota, dengan cara memberikan manfaat yang dirasakan bagi anggota, baik berupa Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) maupun Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

(METL). Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) yaitu manfaat yang diterima langsung oleh anggota diperoleh pada saat melakukan transaksi dengan koperasi, Sedangkan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL), yaitu manfaat yang diterima anggota bukan pada saat terjadi transaksi, tetapi diperoleh kemudian pada akhir suatu periode tertentu berupa Sisa Hasil Usaha.

Menurut penelitian terdahulu oleh Sinarjadi dan Ratnawati (2015), “Analisis Struktur Modal, Tingkat Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Tambah Ekonomis”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa struktur modal, tingkat pertumbuhan, dan ukuran perusahaan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai tambah ekonomi.

Menurut Nugraha (2013), “Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks Kompas 100”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap EVA. Perhitungan struktur modal dengan *Debt to Aset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Pratautami (2010), “Analisis Struktur Modal Perusahaan Dihubungkan dengan *Economic Value Added*” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah struktur modal (kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas) baik secara simultan maupun parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Economic Value Added*.

Jika berpedoman pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang diduga memberikan pengaruh pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan sangat berperan terhadap pengembalian nilai koperasi. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja keuangan pada KPRI-KPKS dengan modal yang diperolehnya sehingga dapat dilihat sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh anggota. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti melanjutkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Economic Value Added* dan Kaitannya dengan Manfaat Ekonomi Anggota” (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia - Korps Pegawai Kesehatan Sumedang pada periode 2013-2022).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang pada periode 2013-2022.
2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang dengan pendekatan *Economic Value Added* (EVA).
3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang pada periode 2013-2022.

4. Bagaimana manfaat ekonomi bagi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan dengan pendekatan *Economic Value Added* (EVA) dan kaitannya dengan manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Struktur modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang pada periode 2013-2022.
2. Perkembangan kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang dengan pendekatan *Economic Value Added* (EVA).
3. Pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang pada periode 2013-2022.
4. Manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa studi dengan praktek yang sesungguhnya, dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terutama mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan. Selain itu, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta memberikan dorongan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan manajemen keuangan terutama mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk membuat perbandingan di setiap tahunnya sebagai bahan pendukung dalam membuat keputusan sesuai kinerja keuangan koperasi. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peneliti lain, untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian pada bidang yang sama.